

**EVALUASI PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DI KABUPATEN PESAWARAN**

**Skripsi**

**Oleh**

**Ahmad Febrian Arahap**

**1416041002**



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2021**

## ABSTRAK

### EVALUASI PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN PESAWARAN

Oleh  
**Ahmad Febrian Arahap**

Permukiman berasal dari kata *housing settlement* yang artinya permukiman. Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 H menjelaskan bahwa tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak bagi setiap orang. Saat ini jumlah masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia masih cukup besar, yang menyebabkan banyak tempat tinggal warga yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sebagai upaya untuk mengurangi RTLH dan pemenuhan Program Nasional Pembangunan. Pendataan di Tahun 2017 Rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesawaran terdapat 160 rumah di dua kecamatan, adapun kecamatan itu adalah Kecamatan Way Lima dan Kecamatan Gedong Tataan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam masyarakat penerima program bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesawaran. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada evaluasi perencanaan dan pengembangan, serta evaluasi dampak sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dalam jangka waktu 2016-2021 yang kemudian telah dilaksanakan dengan adanya dan bantuan berupa barang seperti batu bata, semen, pasir dan sebagainya dengan jumlah Rp. 17.500.000. Namun, pada evaluasi *monitoring* dan evaluasi efisiensi masih belum cukup baik, hal ini dikarenakan kurangnya dana APBD dan APBN yang terealisasi dengan jumlah dana yang dianggarkan, sehingga perlu adanya peningkatan agar program rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesawaran dapat merata di setiap daerah.

**Kata Kunci :** Dinas Perumahan dan Permukiman, Rumah Tidak Layak Huni, Evaluasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

## **ABSTRACT**

### **EVALUATION OF THE ASSISTANCE PROGRAM FOR UNLIABLE HOUSING BY THE DEPARTMENT OF HOUSING AND SETTLEMENT AREA IN PESAWARAN REGENCY**

**By**  
**Ahmad Febrian Arahap**

Settlement comes from the word housing settlement which means settlement. The UUD 1945 chapter XA concerning human rights, Article 28 H explains that a proper place to live and an environment is a right for everyone. Currently, the number of low-income people in Indonesia is still quite large, which causes many residents to live in the category of Uninhabitable Houses (RTLH). As an effort to reduce the RTLH and fulfillment of the National Development Program. Data collection in 2017 Uninhabitable houses in Pesawaran Regency have 160 houses in two sub-districts, the sub-districts are Way Lima District and Gedong Tataan District. The purpose of this research is to analyze and describe the implementation of the Public Housing and Settlement Service Office in the recipient community of the uninhabitable housing program in Pesawaran Regency. The method used in this research is qualitative.

The results of this study indicate that the evaluation of planning and development, as well as evaluation of the impact is quite good. This is evidenced by the existence of a regional medium-term development plan (RPJMD) for the period 2016-2021 which has then been implemented with assistance in the form of goods such as bricks, cement, sand and so on with an amount of Rp. 17,500,000. However, the evaluation of monitoring and evaluation of efficiency is still not good enough, this is due to the lack of APBD and APBN funds that are realized with the amount of budgeted funds, so that there is a need for improvement so that the program for uninhabitable houses in Pesawaran Regency can be evenly distributed in each region.

**Keywords:** Department of Housing and Settlements, Uninhabitable Houses, Evaluation, Regional Medium Term Development Plan.

**EVALUASI PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DI KABUPATEN PESAWARAN**

Oleh  
**Ahmad Febrian Arahap**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2021**



Judul Skripsi : **Evaluasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Pesawaran**


Nama Mahasiswa : **Ahmad Febrian Arahap**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1416041002**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



  
**Meiliyana, S.IP., M.A.**

NIP. 197405202001122002

  
**Ita Prihantika, S.Sos., M.AP.**

NIP. 198406302015042002

2. **Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

  
**Meiliyana, S.IP., M.A.**

NIP. 197405202001122002



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: **Meiliyana, S.IP., M.A.**



Sekretaris

: **Ita Prihantika, S.Sos., M.AP.**



Penguji Utama

: **Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



**Dra Ida Nurhaida, M.Si.**

**NIP. 196108071987032001**

**Tanggal Lulus Ujian : 27 Desember 2021**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 27 Desember 2021  
Yang membuat pernyataan,



Ahmad Febrian Arahap  
NPM 1416041002

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ahmad Febrian Arahap, lahir di Buyut Udik Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 5 Februari 1996. Penulis merupakan anak yang dilahirkan oleh pasangan alm. Abu Hasan Azhari, S.Pd dan almh. Happiyah. Pada tahun 2003-2004 penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Pertiwi Kota Gajah, Lampung Tengah. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2004-2009 di SDN 1 Kota Gajah, Lampung Tengah. Selanjutnya Sekolah Menengah Pertama di SMPN 02 pada tahun 2009-2011. Sekolah Menengah Akhir di SMAN 1 Terbanggi Besar pada tahun 2011-2014. Kemudian diterima di Universitas Lampung, Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Tahun 2014.



# MOTTO

*Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali."*

*(HR Tirmidzi)*

*" Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat."*

*(Imam Syafi'i)*

*"Jika kamu mengucapkan syukur, saya akan memberi kamu lebih banyak."*

*( QS. Ibrahim: 71)*

*Jika Kamu dijatuhkan oleh manusia, maka Bangkitlah karena Allah.*

*(Ahmad Febrian Arahap)*

## *PERSEMBAHAN*



**Dengan segala kerendahan hati mengucapkan rasa syukur atas segala karunia, kasih sayang dan hikmat Allah SWT  
Saya persembahkan Skripsi ini kepada :**

Ayahanda Dan Ibunda Tercinta  
Bapak alm. Abu Hasan Azhari S.pd dan alm. Happiyah  
**Segala pencapaian ini tidak terlepas dari doa yang  
kalian panjatkan di setiap sujud. Terima kasih untuk pengorbanan,  
bimbingan, dan kasih sayang tak terhingrayang  
kalian berikan kepada saya.  
Saya selalu bersyukur kepada Tuhan karena dilahirkan dari orang tua  
yang hebat seperti Bapak dan Ibu.**

Ketiga Kakak Tersayang  
Verawati S.IP, Yuli yanti S.E dan Zainal Arif Arahap  
**Terima kasih atas dukungan dan doa hingga skripsi ini terselesaikan.  
Mari kita bersama – sama membahagiakan Bapak dan Ibu.**

Keluarga Besar dan Sahabat  
**Terimakasih sudah menemani dalam setiap suka dan duka.  
Semoga semua doa baik akan dikabulkan dan berbalik juga pada  
kalian**

Para Pendidik Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
**Terimakasih untuk membimbing dengan penuh ketulusan dan memberikan bekal ilmu serta pesan moral yang bermanfaat  
Pengalaman berharga ini takan saya lupakan**

Serta

Almamater Tercinta  
Universitas Lampung

## SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada Allah SWT beserta segala limpah dan rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“EVALUASI PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN PESAWARAN”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pihak pembaca. Penulis telah banyak menerima bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati sebagai wujud rasa hormat dan penghargaan serta terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Universitas Lampung.
2. Ibu Meiliyana, S.IP,.M.A. selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang



telah membantu memberikan kemudahan kepada penulis semasa kuliah.

3. Bapak Nana Mulyana S.IP., M.SI selaku Dosen Pembimbing Pertama skripsi penulis, terimakasih atas bimbingan dan kebesaran hati kepada penulis selama masa bimbingan.
4. Ibu Ita Prihantika, S. Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah mencurahkan kesabaran masukan, saran dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Eko Budi Sulistio, S.sos., M.AP selaku penguji yang telah mencurahkan kesabaran masukan, saran dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Administrasi Negara Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Universitas Lampung atas segala ilmu yang diberikan selama ini.
7. Segenap informasi peneliti di Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten pesawaran Lampung terima kasih kepada bapak firman rusli S.T M.T selaku kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten pesawaran,Lampung Selatanyang telah memberikan izin dan waktu luang untuk membantusaya dalam mendapatkan informasi data – data terkaitpenelitian ini.
8. Kedua orang tua, kakak, tante dan seluruh sanak saudara. Terimakasih untuk kasih sayang, doa, dukungan, bimbingan dan motivasi yang tak pernah henti diberikan hingga aku bisa menjadi seperti sekarang ini. Terimakasih atas kepercayaan dan amanat yang selama ini kalian berikan kepadaku untuk menyelesaikan studiku sehingga aku bisa mencapai gelar Sarjana.

9. Rekan – rekan GELAS ANTIK (Angkatan Empat Belas Kader Administrasi Negara) yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas kebersamaanya. Terima kasih atas segala bantuan, motivasi, solidarisme, dan dukungan selama kita bersama-sama.

10. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya. Terimakasih atas dukungannya.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis meminta maaf apa bila ada kesalahan yang disengaja atau pun tidak di sengaja.Semoga skripsi ini bermanfaat.

Bandar lampung, Desember 2021

Penulis,

**Ahmad Febrian Arahap**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Evaluasi.....	10
1. Definisi Evaluasi .....	10
2. Jenis - Jenis Evaluasi.....	11
3. Tujuan Evaluasi.....	13
B. Tinjauan Tentang Evaluasi Program .....	14
1. Pengertian Evaluasi Program .....	14
2. Model-Model Evaluasi Program .....	20
C. Definisi Perumahan dan Permukiman.....	27
1. Pengertian Perumahan.....	27
2. Pengertian Permukiman .....	28
3. Unsur-Unsur Perumahan .....	29
4. Asas dan Tujuan .....	30
5. Penyelenggaraan Perumahan.....	30



### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian.....	34
B. Fokus Penelitian .....	35
C. Lokasi Penelitian .....	36
D. Sumber Data .....	36
1. Data Primer .....	37
2. Data Sekunder.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
1. Wawancara .....	38
2. Dokumentasi .....	38
F. Teknik Pengolahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
1. Reduksi Data .....	42
2. Penyajian Data .....	42
3. Penarikan Kesimpulan .....	42
H. Teknik Keabsahan Data .....	43

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
1. Gambaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pesawaran .....	45
2. Situasi dan Kondisi Kabupaten Pesawaran .....	49
B. Hasil Dan Pembahasan Penelitian .....	51
1. Evaluasi Perencanaan dan Pengembangan .....	52
2. Evaluasi <i>Monitoring</i> .....	57
3. Evaluasi Dampak .....	62
4. Evaluasi Efisiensi.....	66

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	72

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Daftar Informan Penelitian.....	39
2. Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan Kabupaten Pesawaran.....	42
3. Data Desa yang Telah Mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Pesawaran 2018.....	58
4. Data Desa yang Telah Mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Pesawaran 2019.....	59

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pesawaran.....	44
2. Wawancara Peneliti dengan informan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran .....	76
3. Wawancara Peneliti dengan Informan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran .....	76
4. Laporan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni .....	77
5. Laporan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni .....	78
6. Laporan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni .....	79
7. Laporan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni .....	80
8. Laporan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni .....	81



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permukiman sering disebut perumahan dan sebaliknya. Permukiman berasal dari kata *housing settlement* yang artinya permukiman. Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah serta prasarana dan sarana lingkungan. Perumahan menitik beratkan pada fisik atau benda mati, yaitu *house* dan *land settlement*.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 H dijelaskan bahwa tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak bagi setiap orang. Karena setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyebutkan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Saat ini jumlah masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia masih cukup

besar, yang menyebabkan banyak tempat tinggal warga yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Berdasarkan Pendataan yang dilakukan jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia mencapai 2,3 juta rumah. Keadaannya rusak ringan hingga berat. Untuk daerah-daerah di Indonesia jumlah rumah tidak layak huni sebarannya merata.

Hal ini disebabkan karena adanya faktor ledakan penduduk, baru dalam beberapa dasawarsa yang terakhir ini menimbulkan masalah-masalah yang diusahakan penyelesaiannya, masalah-masalah tersebut diantaranya adalah adanya masyarakat berpenghasilan rendah dan adanya pemukiman kumuh serta rumah tidak layak huni di beberapa daerah, untuk itu perlu adanya penyelesaian, antara lain dengan mempergunakan sarana hukum. Faktor lain adalah faktor keterjangkauan daya beli masyarakat, dalam hal ini pemerintah seharusnya mampu ikut memecahkan masalah keterjangkauan daya beli masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni.

Pada segi pemerintahan, pemerintah dianggap dan dipandang tidak cakap dan tidak peduli dalam menangani pelayanan terhadap masyarakat. Sementara pada dampak sosial, dimana sebagian masyarakat kumuh adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan kemampuan ekonomi menengah kebawah dan dianggap sebagai sumber ketidakteraturan dan ketidakpatuhan terhadap norma-norma sosial, dan dari segi sosial dari pemukiman kumuh cenderung terjadinya perilaku menyimpang ini juga diperkuat oleh pola kehidupan kota yang acapkali bertentangan dengan nilai-nilai moral dan norma-norma sosial dalam masyarakat.

Permukiman memberikan kesan tentang kumpulan permukiman beserta sikap dan prilakunya di dalam lingkungan sehingga permukiman menitik beratkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati, yaitu manusia (*human*). Dengan demikian, perumahan dan permukiman merupakan dua hal yang tidak dapat di pisahkan dan sangat erat hubungannya, pada hakikatnya saling melengkapi. Adapun permukiman kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah di lihat dari *standart* hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, permukiman kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan yang belum mapan.

Hampir semua kota di negara berkembang menunjukkan adanya permukiman kumuh di bagian-bagian kotanya. Sebagian besar permukiman kumuh merupakan tempat tinggal penduduk miskin di pusat kota dan permukiman padat tidak teratur di pinggiran kota yang penghuninya berasal dari para migran luar daerah. Sebagian dari permukiman kumuh ini merupakan permukiman ilegal ditanah yang bukan miliknya, tanpa seizin pemegang hak tanah sehingga disebut permukiman liar.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulun Perumahan Swadaya. Maka dari itu untuk mengatasi rumah tidak layak huni maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran melaksanakan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni. Dinas Perumahan



Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran merupakan pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi urusan perumahan dan kawasan permukiman, terkait dengan aspek teknis bangunan, perencanaan dan pemanfaatan ruang bagi pengembang permukiman, urusan teknis pembangunan prasarana, pengelolaan sampah dan kebersihan, penataan dan pengendalian estetika.

Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan dan kawasan permukiman terkait dengan aspek teknis bangunan, perencanaan dan pemanfaatan ruang bagi pengembangan permukiman, urusan pengembangan gedung dan prasarana lingkungan kota pengelolaan sampah dan kebersihan, penataan dan pengendalian estetika kota. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perumahan dan kawasan permukiman terkait dengan aspek teknis bangunan, perencanaan dan pemanfaatan ruang bagi pengembangan permukiman, urusan pembangunan gedung dan prasarana lingkungan kota.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesawaran. Program yang diberikan ialah bantuan stimulan swadaya untuk rumah yang tidak layak huni awalnya program tersebut akan diberikan untuk seluruh masyarakat kabupaten Pesawaran yang memiliki kriteria rumah tidak layak huni, tetapi saat

ini baru terealisasikan di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Way Lima dan Kecamatan Gedong Tataan, karena hampir setengah dari penduduk di Kecamatan Way Lima dan Kecamatan Gedong Tataan menempati rumah tidak layak huni.

Perumahan swadaya ini diartikan sebagai perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Pemerintah kemudian membagi pemenuhan rumah swadaya ini ke dalam dua kategori, yakni pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas rumah tak layak huni (RTLH). Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 mencatat jumlah RTLH di Indonesia sebanyak 2,51 juta unit dengan rincian 2,18 juta rawan layak huni dan 0,33 juta benar-benar tak layak huni. Pekerjaan rumah pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 adalah menurunkan jumlah RTLH dari 2,51 juta unit menjadi 1,9 juta unit. Sehingga Pemerintah harus mengurangi RTLH sebanyak 610.000 unit hingga 2019 (*Okezone, 2018*).

Sebagai upaya untuk mengurangi RTLH dan pemenuhan Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah, Kementerian PUPR merilis program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program BSPS pada dasarnya merupakan bantuan berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitasnya (PSU) untuk bantuan BSPS tidak menyalurkan dalam bentuk uang tunai. Tapi diberikan dalam bentuk bantuan bahan bangunan. Selain tidak menyalurkan dalam bentuk uang tunai. Tapi diberikan dalam bentuk bantuan bahan bangunan. Selain itu, BSPS merupakan stimulan bagi masyarakat untuk bisa bergotong-royong dalam meningkatkan

kualitas RTLH. Besarnya bantuan pun mulai dari Rp.7,5 sampai dengan Rp.15 juta yang diberikan dalam bentuk bahan bangunan.

Agar bisa mendapatkan BSPS, yang tinggal di dalam RTLH tak bisa semata-mata mengajukan sendiri, melainkan harus diawali dengan usulan Bupati atau Walikota. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2016 untuk memilih calon penerima bantuan (CPB). Adapun kriteria CPB yang dimaksud, antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), masuk kategori MBR dengan penghasilan di bawah Rp.4 juta dan memiliki atau menguasai tanah. Selain itu, belum memiliki rumah atau memiliki dan menghuni RTLH, dan belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah.

Pada tahun 2017 Direktorat Rumah Swadaya Kementerian PUPR menaikkan target peningkatan kualitas RTLH melalui program BPS. Salah satu wilayah yang menjadi target penyaluran BPS adalah Kabupaten Pesawaran di Kabupaten Pesawaran masyarakatnya masih banyak yang memiliki rumah tidak layak huni. Untuk bisa mendapatkan BPS, tak bisa semata-mata mengajukan sendiri, melainkan harus diawali usulan Bupati. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2016 untuk memilih calon penerima bantuan (CPB).

Rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesawaran dari hasil pendataan di Tahun 2017 terdapat 160 rumah di dua kecamatan, adapun kecamatan itu adalah Kecamatan Way Lima dan Kecamatan Gedong Tataan. Untuk mengatasi rumah tidak layak huni maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

melaksanakan program yaitu Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni. Program ini sudah mulai dilaksanakan pada Juli Tahun 2017 di Kabupaten Pesawaran. Program yang diberikan ialah bantuan stimulan swadaya untuk rumah yang tidak layak huni. Awalnya program tersebut akan diberikan untuk satu Kabupaten Pesawaran, tetapi saat ini hanya difokuskan untuk kedua kecamatan yaitu Kecamatan Way Lima dan kecamatan Gedong Tataan, dari hasil data yang diungkapkan oleh ibu Ricke Leony selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman (*Kupastuntas, 2018*).

Berdasarkan hasil observasi dengan bapak Zulhari Aji selaku warga Kecamatan Way Lima yang memiliki kriteria rumah tidak layak huni mengeluhkan masih terdapat rumah yang sudah masuk dalam kriteria program penerima bantuan rumah tidak layak huni tetapi tidak masuk dalam usulan Bupati Pesawaran. Adapun masalah yang ditimbulkan waktu pelaksanaan terdapat warga yang merasa tidak puas dan tidak cukup terhadap pembangunan program rumah layak huni tersebut. Sehingga warga program tersebut tidak berbentuk jadi melainkan uangnya saja agar mereka sendiri yang membangunnya. Maka pentingnya pengawasan dan mengevaluasi program Dinas Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam masyarakat penerima program bantuan rumah tidak layak huni ini benar-benar berguna dan terealisasi dengan transparan.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Program Bantuan Rumah**

## **Tidak Layak Huni oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pesawaran”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah mengevaluasi Implementasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam masyarakat penerima Program Bantuan Rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesawaran?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam masyarakat penerima program bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesawaran.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan pengetahuan dalam perkembangan ilmu administrasi publik khususnya yang berkaitan dengan responsivitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terhadap masyarakat penerima program bantuan rumah tidak layak huni.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan bagi para Pemerintah Kabupaten Pesawaran, khususnya bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Evaluasi**

##### **1. Definisi Evaluasi**

Secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:272) evaluasi berarti penilaian. Sedangkan menurut Wirawan (2012:7) evaluasi adalah:

“Riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut”.

Menurut buku Metode Riset Evaluasi, Hadi (2011:13) mendefinisikan evaluasi sebagai “proses mengumpulkan informasi mengenai suatu objek, menilai suatu objek, dan membandingkannya dengan kriteria, standar dan indikator”.

Selanjutnya dalam buku yang sama Hadi (2011: 13-14) memaparkan riset evaluasi sebagai:

“Aplikasi sistematis dari prosedur riset sosial untuk menaksir atau menilai konseptualisasi dan desain, implementasi serta utilitas program intervensi sosial. Menurut definisi ini, riset evaluasi melibatkan pemakaian metodologi riset sosial untuk memberikan putusan atau penilaian dan untuk meningkatkan perencanaan, pemantauan, efektivitas, dan efisiensi suatu program sosial. Program sosial tersebut beragam diantaranya ialah, program kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan program layanan manusia lainnya”.

Pendapat selanjutnya muncul dari Husni (2010: 971), yang menyatakan bahwa “evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi mengenai hasil

penilaian atas permasalahan yang ditemukan”. Sedangkan menurut Arikunto (2010:1). “Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

Sejalan dengan definisi evaluasi menurut Wirawan dan Hadi, secara sederhana menurut peneliti evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah tahapan penilaian yang ditujukan kepada objek evaluasi, untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dideskripsikan dalam bentuk informasi. Dalam penelitian ini objek yang akan dievaluasi adalah program pemerintah dibidang pariwisata yaitu program sapta pesona, yang dalam proses evaluasinya akan melihat pelaksanaan ketujuh unsur sapta pesona yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, serta kenangan. Hasil yang akan dideskripsikan dari evaluasi ini ialah informasi mengenai pelaksanaan sapta pesona pada objek wisata Lembah Hijau, serta hasil evaluasi yang merujuk pada penilaian unsur sapta pesona yang terlaksana dengan baik dan tidak terlaksana dengan baik.

## **2. Jenis - Jenis Evaluasi**

Wirawan (2012: 16-18) membedakan jenis-jenis evaluasi berdasarkan objeknya menjadi beberapa jenis yaitu:

### **a. Evaluasi Kebijakan**

“Kebijakan adalah rencana umum dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas. Kebijakan akan berlangsung terus sampai dicabut atau diganti dengan kebijakan yang baru; umumnya karena kebijakan yang lama tidak efektif dan efisien atau karena terjadinya pergantian pejabat dan pejabat baru mempunyai kebijakan yang berbeda dengan pejabat sebelumnya”. Istilah lainnya ialah analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah menentukan atau memilih satu alternatif kebijakan yang terbaik dari sejumlah alternatif kebijakan yang ada. Sedangkan evaluasi kebijakan

adalah menilai kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan” Wirawan (2012: 16-18).

#### b. Evaluasi Program

Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Evaluasi program; “Metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar. Evaluasi Program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*) dan evaluasi akibat (*impact evaluation*)”.

#### c. Evaluasi Proyek

Evaluasi proyek sebagai “kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program”.

#### d. Evaluasi Material

Evaluasi material, untuk melaksanakan kebijakan, program atau proyek diperlukan sejumlah material atau produk-produk tertentu. Misalnya, “untuk melaksanakan program Bus Way diperlukan bus dengan kualitas tertentu: nyaman, memuat banyak penumpang, tahan lama, hemat bahan bakar, dan biaya pemeliharaannya yang murah. Oleh karena itu, bus yang dipergunakan Bus Way dievaluasi dengan kriteria tersebut”.

#### e. Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Evaluasi sumber daya manusia atau yang dikenal dengan evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia atau *human*

*resources development*. Evaluasi sumber daya manusia dapat dilaksanakan disebuah lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, bisnis dan lembaga swadaya masyarakat”.

### **3. Tujuan Evaluasi**

Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan obyek evaluasinya. Menurut Wirawan (2012: 22-23) ada beberapa tujuan evaluasi di antaranya adalah:

1. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat.
2. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai rencana.
3. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar.
4. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menentukan manadimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan.
5. Pengembangan staf program.
6. Memenuhi ketentuan undang-undang.
7. Akreditasi program.
8. Mengukur *cost effectifenis dan cost efficiency*.
9. Mengambil keputusan mengenai program.
10. Akuntabilias.
11. Memberikan balikan kepada pimpinan dan program.
12. Mengembangkan teori evaluasi dan riset evaluasi.

Berdasarkan jenis evaluasi menurut Wirawan (2012: 22-23), maka terkait dengan konteks penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengevaluasi program, yang dalam

hal ini adalah program Program Bantuan Rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan hasil observasi yang memiliki kriteria rumah tidak layak huni mengeluhkan masih terdapat rumah yang sudah masuk dalam kriteria program penerima bantuan rumah tidak layak huni tetapi tidak masuk dalam usulan Bupati Pesawaran, mereka berharap agar mereka mendapatkan program bantuan rumah layak huni. Sehingga pentingnya pengawasan dan mengevaluasi program Dinas Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam masyarakat penerima program bantuan rumah tidak layak huni ini benar-benar berguna dan terealisasi dengan transparan.

## **B. Tinjauan Tentang Evaluasi Program**

### **1. Pengertian Evaluasi Program**

Pemahaman mengenai pengertian evaluasi program dapat berbeda-beda sesuai dengan evaluasi yang bervariasi oleh para pakar evaluasi. Pada dasarnya evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Dengan demikian evaluasi lebih bersifat melihat ke depan dengan mempelajari dan melihat kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan diarahkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program.

Evaluasi program merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi program tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk

perencanaan yang akan dilakukan di depan. Menurut Jones (1994:357), evaluasi program adalah suatu aktifitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dan semua proses pemerintahan. Program itu bervariasi dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis, bentuk rekomendasi dan spesifikasi mengacu pada identifikasi tujuan-tujuan serta kriteria yang harus dievaluasi.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan manajemen strategis yang meliputi perumusan atau perencanaan strategi, implementasi atau pelaksanaan, dan evaluasi, letak penelitian ini adalah pada evaluasi. Jauch dan Glueck (1999:405) mengemukakan bahwa "Evaluasi adalah tahap proses manajemen strategis di mana manajemen berusaha memastikan bahwa yang mereka pilih terlaksana dengan tepat dan mencapai tujuan".

Penelusuran strategi dan pelaksanaannya secara menyeluruh membutuhkan sistem pengendalian, sistem imbalan yang tepat, dan system yang efektif, yang dapat memberi balikan (feedback) yang lengkap dan tepat waktu sehingga mereka dapat bertindak atas dasar itu. Ini semuanya adalah unsur-unsur integral dari evaluasi untuk memastikan agar rencana akan berjalan dan sedang berjalan.

Sistem evaluasi juga diperlukan sebagai cara untuk mencari umpan balik sebagai masukan untuk perencanaan baru dan sebagai sarana untuk pengecekan/pengujian ganda bahwa yang dipilih sudah konsisten, tepat, dan dapat dijalankan dengan analisis internal dan eksternal serta rencana untuk melaksanakannya. Umpan balik



tersebut juga digunakan untuk melakukan kegiatan perbaikan, penyempurnaan, dan pengembangan secara terus-menerus.

Definisi evaluasi yang dikemukakan oleh Wandt dan Brown (dalam Sudijono, 2005:1) adalah “suatu tindakan atau suatu yang menentukan nilai dari sesuatu”. Kata-kata yang terkandung dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, menggunakan strategi dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan Suchman dalam Anderson (dalam Arikunto dan Jabar, 2004:1) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

Definisi lain dikemukakan oleh Worthen dan Sanders dalam Anderson (dalam Arikunto dan Jabar, 2004:1) yang mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu; dalam mencari sesuatu tersebut, juga termasuk mencari manfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Kemudian seorang ahli yang sangat terkenal dalam evaluasi program bernama Stufflebeam dalam Fernandes (dalam Arikunto dan Jabar, 2004:1) mengatakan bahwa “evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi keputusan dalam menentukan alternatif keputusan”.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dijelaskan bahwa “evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana standar”. Lebih lanjut dalam Penjelasan atas PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan juga dijelaskan bahwa evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang”.

Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) dari pelaksanaan rencana. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-kurangnya indikator masukan, indikator keluaran, dan indikator hasil.

Secara umum, evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidaknya memiliki tiga macam fungsi pokok, yaitu:

1. Mengukur kemajuan.
2. Menunjang penyusunan rencana.
3. Memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali

(Sudjono, 2005:8).

Sedangkan menurut Akdon (2007:176) fungsi evaluasi adalah untuk melihat tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Keuntungan dari evaluasi bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, strategi, kebijakan; untuk pengambilan keputusan; untuk tujuan pengendalian program/kegiatan; untuk perbaikan input, proses, dan output, perbaikan tatanan atau sistem prosedur.

Bagi para manajer yang melakukan evaluasi atau penilaian akan menemukan satu dari tiga bentuk temuan, yaitu:

1. hasil yang dicapai melebihi harapan dan target,
2. hasil yang dicapai sama dengan harapan dan target.
3. hasil yang dicapai kurang dari harapan dan target (Siagian, 2007:262).

a) Hasil yang dicapai melebihi harapan dan target.

Dalam hal ini, manajemen harus waspada agar jangan sampai terlalu cepat merasa puas. Sikap proaktif tetap diperlukan dalam arti menumbuhkan kesadaran bahwa keberhasilan yang diraih perlu digunakan sebagai modal untuk meningkatkan kinerja organisasi dimasa depan. Dalam hal keberhasilan diperlukan penilaian tentang faktor-faktor organisasional yang mendukung keberhasilan tersebut dan atau masalah apa yang berhasil diatasi dan bagaimana cara mengatasinya.

b) Hasil yang dicapai sama dengan harapan dan target

Dalam hal ini yang harus dinilai adalah kinerja semua satuan, semua bidang fungsional dan semua satuan kerja operasional dan penjumlahan keseluruhan hasil itulah yang digunakan untuk melihat apakah hasil yang dicapai sama

dengan harapan dan target atau tidak. Manajemen puncak terhadap berbagai faktor organisasional, baik yang mendukung maupun yang menjadi sumber kendala sangat diperlukan.

c) Hasil yang dicapai kurang dari harapan dan target.

Dalam menghadapi kondisi seperti ini, manajemen puncak perlu “lapang dada dan kepala dingin”. Artinya, kalau pun ada rasa kecewa dan perasaan demikian wajar, perasaan tersebut tidak menguasai cara berpikir dan cara bertindak sedemikian rupa, sehingga para pelaksana kegiatan operasional serta merta dituding tidak cakap, tidak terampil, tidak loyal, semangat kerja rendah dan berbagai predikat negatif lainnya. Manajemen puncak perlu dengan lebih jernih melihat faktor-faktor organisasional yang mungkin menjadi penyebab ketidakberhasilan itu.

Dengan demikian evaluasi dalam penelitian ini adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi terhadap rencana dan standar serta untuk dapat mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program.

Menurut Arikunto dan Jabar (2004:3) mendefinisikan program sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang terjadi dalam suatu organisasi dan melibatkan sekelompok orang

Pendapat berikutnya masih menurut Arikunto dan Jabar (2004:5) bahwa program terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling menunjang

dalam rangka mencapai suatu tujuan. Ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu:

1. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan
2. Terjadi dalam waktu relatif lama bukan kegiatan jamak berkesinambungan
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang (dalam Arikunto dan Jabar, 2004:3).

Sedangkan dalam PP No. 39 Tahun 2006 tentang tata pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dijelaskan bahwa program instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Jadi program dalam penelitian ini adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan dalam rangka mencapai suatu tujuan.

## **2. Model-Model Evaluasi Program**

Evaluasi program adalah langkah awal pengumpulan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian tindak lanjut yang tepat pula. Evaluasi program sangat penting dan bermanfaat terutama bagi para pengambil keputusan. Sedangkan evaluator adalah orang yang melakukan evaluasi. Banyak ragam atau jenis evaluasi yang dipakai sebagai strategi atau pedoman kerja pelaksanaan

evaluasi program. Hamalik (2003:212) mengemukakan bahwa model atau jenis evaluasi program tersebut adalah:

- a. Evaluasi perencanaan dan pengembangan. Sasaran utamanya adalah memberikan bantuan kepada penyusun program dengan cara menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka mendesain suatu program. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk meramalkan implementasi program dan kemungkinan tercapai tidaknya program di kemudian hari.
- b. Evaluasi *monitoring* dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa apakah program mencapai sasaran efektif. Apakah hal-hal dan kegiatan yang telah didesain secara spesifik dalam program itu terlaksana sebagaimana mestinya. Kenyataan tidak jarang program justru tidak mencapai sasaran, karena apa yang telah didesain dalam program tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai alasan seperti pengadaan personil, fasilitas, perlengkapan, biaya, dan faktor-faktor penyebab lainnya.
- c. Evaluasi dampak, bertujuan menilai seberapa jauh program dapat memberikan pengaruh tertentu pada sasaran yang telah ditetapkan, apakah program berdampak positif atau justru sebaliknya. Dampak tersebut diukur berdasarkan kriteria-kriteria keberhasilan, sehingga program tersebut perlu di spesifikasi agar dapat diamati dan diukur setelah program itu dilaksanakan.
- d. Evaluasi efisiensi, dimaksud untuk menilai berapa besar tingkat efisiensi suatu program. Apakah program mampu memberikan keuntungan memadai ditinjau



dari segi biaya yang dikeluarkan, tenaga yang digunakan dan waktu yang terpakai.

- e. Evaluasi program komprehensif, yaitu dampak menyeluruh terhadap program yang meliputi; implementasi program, dampak atau pengaruh setelah program dilaksanakan dan tingkat efisiensi program.

Terdapat beberapa model evaluasi lainnya yang populer diantaranya menurut Tayibnapi (2008: 13-22) membedakan model evaluasi program:

1. *Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stufflebeam, adalah ahli yang mengusulkan pendekatan yang berorientasi kepada pemegang keputusan. Ia merumuskan evaluasi sebagai “suatu proses menggambarkan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan”.
2. Evaluasi model UCLA, dikembangkan oleh Alkin. Alkin mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan, dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan an memilih beberapa alternatif.
3. Model Brinkerhoff, mengemukakan tiga golongan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, seperti evaluator-evaluator lain, diantaranya 1). *Fixed vs emergent evaluator design*. 2). *Formatif vs sumatif evaluation*, 3). *Experimental and quasi experimental design vs natural/unobtrusive inquiry*.

4. Model Stake atau Countenance, penekanan yang umum atau hal yang penting dalam model ini ialah bahwa evaluator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. Stake mengatakan bahwa *description* di suatu pihak berbeda dengan *judgment* atau menilai.

Selanjutnya Wirawan (2012:17) mengelompokkan evaluasi program menjadi 3 bagian yang berbeda yaitu:

1. Evaluasi Proses (*process evaluation*) yaitu meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, dan apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani.
2. Evaluasi manfaat (*outcome evaluation*) meneliti, menilai, dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan.
3. Evaluasi akibat (*impact evaluation*) dimana melihat perbedaan yang ditimbulkan sebelum dan setelah adanya program tersebut.

Menurut Wirawan (2012:17) bagian evaluasi proses (*process evaluation*) dapat dipergunakan untuk menilai pelaksanaan suatu layanan program, dimana implementasi atau pelaksanaan suatu program akan terlihat dari keseluruhan proses atau serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi proses dijalankan dengan melakukan penilaian terhadap sebuah informasi yang diperoleh, dengan melihat apakah layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, informasi tersebut kemudian dianalisis dan dapat disajikan dengan data yang bersifat kualitatif.

Dalam modul pengantar evaluasi program Wirawan menjelaskan bahwa evaluasi proses dilakukan dalam 2 tahapan penilaian yaitu:

- a. Tahap pertama, pengukuran atau penilaian dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil tes terhadap standar yang ditetapkan.
- b. Tahap kedua, perbandingan yang telah diperoleh kemudian disimpulkan dan dikualitatifkan sesuai dengan tujuan penilaian yang ingin dicapai dari evaluasi tersebut.

Dua orang ahli evaluasi, yaitu Cronbach dan Stufflebeam (dalam dan Jabar, 2004:4) mengemukakan bahwa evaluasi program upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Kemudian menurut Arikunto dan Jabar (2004:7), evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya. Dengan demikian, kegiatan evaluasi program pada tujuan, atau dengan kata lain, tujuan tersebut dijadikan ukuran keberhasilan.

Apabila suatu program tidak dievaluasi maka tidak dapat diketahui bagaimana dan seberapa tinggi kebijakan yang sudah dikeluarkan terlaksana. Informasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program, karena dari masukan hasil evaluasi program itulah para pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan. Ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah program keputusan yaitu:

1. Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.
2. Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit).
3. Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat.
4. Menyebarluaskan program (melaksanakan program di tempat atau mengulangi lagi program di lain waktu, karena program tersebut berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang lain (Arikunto dan Jabar, 2004:8-9).

Sudjana (2006:51) mengelompokkan model-model evaluasi program menjadi enam (6) kategori yaitu:

1. Evaluasi terfokus pada pengambilan keputusan.
2. Evaluasi unsur-unsur program.
3. Evaluasi jenis dan tipe kegiatan.
4. Evaluasi pelaksanaan program.

Fokus model-model yang termasuk dalam kategori ini adalah evaluasi berbagai proses pelaksanaan program. Sebagian model berhubungan dengan proses evaluasi lanjutan terhadap pelaksanaan program. Enam model yang termasuk ke dalam kategori ini adalah sebagai berikut :

- a) Model Appraisal.

- b) Pengelolaan Data.
- c) Model Proses secara alamiah.
- d) Evaluasi *Monitoring*.
- e) Evaluasi Perkembangan.
- f) Evaluasi Transaksi.
- g) Evaluasi pencapaian tujuan khusus program
- h) Evaluasi hasil dan pengaruh program

Untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah/swasta maka seluruh aktivitas instansi/lembaga tersebut harus dapat diukur. Dalam rangka melakukan pengukuran kinerja instansi, perlu dibuat dulu rencana kinerja tahunan yang diambil dari strategik yang berjangka lima tahunan. Menurut Akdon (2007:174), “perencanaan tahunan dapat dibuat dengan membuat visi, misi, tujuan, sasaran, yang cara pencapaiannya memuat kebijakan dan program satu tahun yang akan dikerjakan”.

Rencana kinerja tahunan ini dibuat rencana pengukuran kinerja dengan menguraikan per-program ke dalam kegiatan tahunan, yang selanjutnya dapat dibuat indikator-indikatornya. Indikator kinerja kegiatan terdiri dari:

1. Indikator kinerja input (masukan) adalah indikator segala yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan; misal dana, SDM, kebijakan dan lain-lain.
2. Indikator kinerja output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dari suatu kegiatan yang dapat fisik maupun non fisik.

3. Indikator kinerja outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang berfungsinya keluaran (output) kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator kinerja benefit (manfaat) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator kinerja impact (dampak) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan (Akdon, 2007 :168-169).

Akdon (2007:179) mengemukakan bahwa evaluasi terhadap program dilakukan untuk mencari jawaban akan outcome yang dihasilkan, evaluasi terhadap kebijakan mungkin saja sampai dampak (impact) yang terjadi.

Demikian evaluasi program dalam penelitian ini adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat untuk mencari jawaban akan outcome yang dihasilkan. Sedangkan kinerja yang digunakan dalam penelitian ini mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*).

## **C. Definisi Perumahan dan Permukiman**

### **1. Pengertian Perumahan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.

Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakatnya. Hal ini berarti perumahan di suatu lokasi sedikit banyak mencerminkan karakteristik masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut (Abrams, 1964 : 7).

Perumahan dapat diartikan sebagai suatu cerminan dari diri pribadi manusia, baik secara perorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya dan dapat juga mencerminkan taraf hidup, kesejahteraan, kepribadian, dan peradaban manusia penghuninya, masyarakat ataupun suatu bangsa (Yudhohusodo, 1991 : 1).

Sedangkan perumahan karyawan merupakan tempat tinggal berkonsep rumah deret yang dibangun perusahaan tertentu diperuntukkan bagi karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut untuk dimanfaatkan bagi kendaraan bis karyawan untuk menjemput dan menurunkan penumpang (karyawan) yang seluruhnya bekerja dalam satu kantor (Basri, 2008 : 64).

## **2. Pengertian Permukiman**

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung prikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan permukiman adalah dua hal yang tidak dapat kita pisahkan dan berkaitan erat dengan aktifitas ekonomi, industrialisasi dan pembangunan daerah.



Permukiman adalah perumahan dengan segala isi dan kegiatan yang ada di dalamnya. Berarti permukiman memiliki arti lebih luas daripada perumahan yang hanya merupakan wadah fisiknya saja, sedangkan permukiman merupakan perpaduan antara wadah (alam, lingkungan, dan jaringan) dan isinya (manusia yang hidup bermasyarakat dan berbudaya di dalamnya), (Kuswartojo, 1997 : 21). Permukiman merupakan bentuk tatanan kehidupan yang di dalamnya mengandung unsur fisik dalam arti permukiman merupakan wadah aktifitas tempat bertemunya komunitas untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat (Aji, 2001 : 51). Sedangkan pengertian perumahan dan permukiman menurut Mangkusoebroto (1993 : 5) adalah tempat atau daerah dimana penduduk bertempat tinggal atau hidup bersama dimana mereka membangun sekelompok rumah atau tempat kediaman yang layak huni dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan.

### **3. Unsur-Unsur Perumahan**

- a. Lingkungan alami: lahan permukiman dan tanah.
- b. Kegiatan sosial: manusia (individu), rumah tangga, komunitas (siskamling, dll).
- c. Bangunan-bangunan rumah tinggal
- d. Sarana dasar fisik dan pelayanan sosial-ekonomi:
  - 1) Warung & toko kebutuhan sehari-hari.
  - 2) Taman bermain, masjid, dll.
- e. Sistem jaringan prasarana dasar fisik:
  - 1) Jaringan jalan.

- 2) Saluran Drainase.
- 3) Sanitasi.
- 4) Air bersih.
- 5) Listrik, komunikasi

#### **4. Asas dan Tujuan**

Asas dari penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil, dan merata, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup (Bab II Pasal 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Sedangkan dalam dalam pasal 4 menyebutkan bahwa penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
- b. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
- c. Memberi arahan pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional.
- d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain.

#### **5. Penyelenggaraan Perumahan**

Penyelenggaraan perumahan dan permukiman adalah pemenuhan kebutuhan perkotaan diwujudkan melalui pembangunan perumahan dan kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pembangunan Perumahan dan kawasan

permukiman tersebut ditunjukkan untuk menciptakan kawasan permukiman dan mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkungan, yang dihubungkan oleh jaringan transportasi sesuai dengan kebutuhan dengan kawasan lain yang memberikan berbagai pelayanan dan kesempatan kerja. Pembangunan perumahan dan permukiman diselenggarakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan :

a. Kriteria pemilihan lokasi

Lokasi tanah harus bebas dari pencemaran air dan pencemaran lingkungan baik berasal dari sumber daya pembuatan atau sumber daya alam. Dapat menjamin tercapainya tingkat kualitas lingkungan hidup yang sehat bagi pembinaan individu dan masyarakat penghuni. Kondisi tanahnya bebas banjir dan memiliki kemiringan tanah 0% - 15%, sehingga dapat dibuat sistem saluran pembuangan air hujan (drainase) dan jaringan jalan setapak yang baik serta memiliki daya dukung yang cukup untuk memungkinkan dibangun perumahan. Terjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat penghuni terhadap tanah dan bangunan di atasnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Prasaran lingkungan

Untuk pembangunan lingkungan Kapling Siap Bangun harus disediakan prasarana lingkungan berupa jalan setapak dan saluran lingkungan yang berstandar sebagai berikut:

### (1). Jalan Setapak

Lebar badan jalan setapak maksimum 2 meter, lebar perkerasan 1,20 meter dengan konstruksi dari rabat beton 1 pc : 3 pasir : 5 koral, tebal 7 cm atau bahan lain yang setara. Di kiri kanan perkerasan dibuat bahu jalan masing-masing dengan lebar 0,4 meter untuk penempatan tiang-tiang listrik dan pipa-pipa saluran lingkungan

### (2). Saluran

Saluran untuk pembuangan air hujan/limbah harus direncanakan sedemikian rupa sehingga lingkungan Kapling Siap Bangun yang ada bebas dari genangan air. Oleh karena itu saluran lingkungan dibuat konstruksi dengan  $\frac{1}{2}$  buis beton diameter 20 cm dan pasangan batako atau yang setara dengan ukuran:

- Lebar atas : 30 cm
- Lebar bawah : 20 cm
- Tinggi minimal : 30 cm
- Kemiringan : 0% - 15%

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat, melalui kebijakan pemberian fasilitas kredit Pemilikan Kapling Siap Bangun atau Kredit Pemilikan Rumah. Namun demikian sejalan dengan kebijakan tersebut, perlu dikaji dan dipertimbangkan sistem jaringan hukum untuk pengamanan kebijaksanaan tersebut. Karena terlihat misalnya dalam peraturan-peraturan yang memuat tentang teknik pembangunan rumah, belum dicantumkan ketentuan-ketentuan yang memuat sanksi atau tindakan lainnya yang perlu dilakukan, bila pedoman

tersebut tidak ditaati/dipenuhi oleh *Developer* atau pihak lainnya. Hal ini adalah sangat penting dalam hubungannya dengan:

- Adanya kepastian hukum.
- Untuk pengaman dana yang disediakan oleh pemerintah.
- Untuk melindungi kepentingan konsumen.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode ini juga bertujuan untuk mengungkap fakta dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Selain itu, metode deskriptif harus searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah serta pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah.

Menurut Moleong (2012:6) menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data secara kata-kata, dan gambar. Sementara itu menurut Denzin dan Lincoln (Herdiansyah 2010:7) menyatakan bahwa penelitian kualitatif lebih ditujukan untuk mencapai pemahaman mendalam mengenai organisasi atau peristiwa khusus daripada mendeskripsikan bagian permukaan dari sampel besar

sebuah populasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyediakan penjelasan tersirat mengenai struktur, tatanan, dan pola yang luas yang terdapat dalam suatu kelompok partisipan. Penelitian kualitatif juga disebut etno-metologi atau penelitian lapangan. Penelitian ini juga menghasilkan data mengenai kelompok manusia dalam latar atau latar sosial.

Beberapa uraian di atas bahwa dapat disimpulkan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang mengungkapkan fenomena yang ada di lapangan yang bersifat empiris dengan menggunakan kata-kata untuk menggunakan menggambarkan kegiatan yang dilakukan serta menafsirkan hasil dari penelitian. Peneliti menggunakan model penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian ini dapat memberikan gambaran kebijakan dan menggambarkan proses pelaksanaan kebijakan sampai diperoleh kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan hal utama dalam penelitian kualitatif. Pada dasarnya penentuan masalah menurut Lincoln dan Guba (Moeleong, 2012:92) yaitu bergantung pada paradigma apakah yang dianut oleh seorang peneliti, yaitu apakah ia sebagai peneliti, evaluator, ataukah sebagai peneliti kebijakan. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif ini hal yang harus diperhatikan dalam masalah dan fokus penelitian.

Evaluasi kebijakan sangat penting dalam menilai suatu kebijakan publik, karena evaluasi memiliki fungsi yang membuat suatu kebijakan perlu untuk dievaluasi. Maka dalam penelitian kualitatif ini untuk mengevaluasi Program Bantuan Rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesawaran penulis menggunakan teori menurut Hamalik (2003:212), mengemukakan dalam evaluasi program bahwa evaluasi memiliki menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi program sebagai berikut:

1. Evaluasi perencanaan dan pengembangan.
2. Evaluasi *monitoring*.
3. Evaluasi dampak.
4. Evaluasi efisiensi.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian dalam melihat fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penetapan penelitian ditentukan secara purposive atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan di dalam lingkup wilayah Kabupaten Pesawaran, khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran merupakan lokasi yang dipilih sebagai lokasi penelitian.

### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Menurut Loftland dalam Moleong (2012:157) sumber data utama pada



penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer yang digunakan adalah berasal dari hasil wawancara, sumber data ditulis atau direkam. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan menggunakan panduan wawancara mengenai strategi pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan kejuruan Teknik pemilihan orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive. Alasan pemakaian teknik *purposive* dikarenakan oleh bentuk dan ciri penelitian ini yaitu untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini. Penentuan orang yang diwawancarai atau responden dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dikarenakan orang tersebut menduduki posisi terbaik yang dapat memberikan informasi-informasi yang akurat terkait dengan topik penelitian ini.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam

rangka mencocokkan data yang diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa berita surat kabar, website, artikel, dan referensi-referensi yang menjadi panduan pemerintah daerah dalam pelayanan air.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik yang dilakukan melalui deskripsi kegiatan kerja lapangan, perilaku, tindakan, percakapan, interaksi, interpersonal, organisasi atau proses masyarakat, atau aspek lain dari pengalaman manusia yang dapat diamati. Data terdiri dari catatan lapangan deskripsi rinci termasuk konteks di mana penelitian dilakukan. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh *Command Center*. Peneliti dapat menentukan informan yang akan diteliti dan juga untuk mengetahui nama, usia, jabatan, tugas/kegiatan, dari calon informan sehingga mudah untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian.

### **2. Wawancara**

Teknik wawancara adalah data primer yang di peroleh langsung dari lapangan. Hasil yang di harapkan dari wawancara dengan para informan adalah agar mendapatkan data yang akurat dan valid yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pada tahap awal, informan di tentukan secara “purposive”, dan dalam pengembangannya di lakukan secara “snowball sampling” sampai di peroleh data dan informasi yang lengkap. Oleh karena itu, informasi di tahap awal ini di dasarkan pada subjek penelitian yang menguasai

masalah, memiliki data dan bersedia memberikan data sebagai informan awal dan kemudian berkembang menjadi luas (*snowballing*) sampai tidak di temukan lagi informasi yang berkenaan dengan tujuan penelitian. Sumber data di bawah ini merupakan orang-orang yang terlibat atau mengalami proses pelaksanaan dan perumusan program di lokasi penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara acak dengan memilih dan menentukan informan yang dianggap tahu dan kenal dalam objek penelitian.

**Tabel 1. Daftar Informan Penelitian**

NO	Nama	Jabatan Informan	Substansi Wawancara
1	Ricke Leony, S.T	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman	1) Gambaran umum Program bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesawaran. 2) Perubahan sosial dalam pelaksanaan program.
2	Anna Mariana	Seksi Perencanaan Perumahan dan Permukiman	1) Pelaksanaan Program bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesawaran. 2) Kendala yang ada dalam pelaksanaan Program bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesawaran.
3	Arifin Firdaus, S.T	Seksi Pembangunan Perumahan dan Permukiman	1) Pelaksanaan Program bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesawaran. 2) Kendala yang ada dalam pelaksanaan Program bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesawaran.
4	Kasnak	Masyarakat yang mendapat bantuan	1) Manfaat Program bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesawaran yang diterima

			masyarakat. 2) Perubahan sosial masyarakat akibat adanya Program bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesawaran. 3) Partisipasi masyarakat dalam Program bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesawaran.
--	--	--	--

*Sumber : diolah oleh peneliti pada tahun 2020*

### 3. Dokumentasi

Dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen mengenai data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung dan dalam hasil yang di dapat melalui narasumber. Dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari bahan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, petunjuk pelaksana program Kotaku, dan dokumen lainnya. Sumber data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: Data yang dikeluarkan oleh Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pesawaran. Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai data yang bersumber dari bahan dan dokumen tulis lainnya dari memorandum organisasi, klinis atau catatan program, dan *coinformance*, publikasi dan laporan resmi, catatan harian pribadi, surat-surat, karya-karya artistik, foto dan memorabilia dan tanggapan tertulis untuk tanggapan terbuka. Data terdiri dari kutipan dari dokumen-dokumen yang diambil dengan cara mencatat dan mempertahankan konteks.

### **F. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data selesai di kumpulkan dari lapangan, tahap berikutnya yang harus di lakukan adalah tahap pengolahan data yaitu :

1. Seleksi data, yaitu untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau tidak dalam pengumpulan data dan untuk mengetahui apakah data telah sesuai dengan pokok bahasan penelitian.
2. Klasifikasi data, yaitu data yang di peroleh di kumpulkan menurut pokok bahasan yang telah di tetapkan. Data yang ada apakah termasuk dalam pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, maupun hasil dan pembahasan.
3. Penyusunan data yaitu menetapkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan sistematis berdasarkan kerangka tulisan yang telah di tetapkan. Setelah data yang terkumpul selesai di seleksi, kemudian di susun secara sistematis dengan memasukan ke dalam kelompok bahasan masing-masing, kemudian di lakukan penganalisisan untuk mendapatkan gambaran yang benarbenar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penulisan di lakukan.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Langkah-langkah analisis data setelah dilakukannya pengumpulan yaitu:

### 1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### 2. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### 3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

#### **H. Teknik Keabsahan Data**

Penelitian kualitatif ini dalam menentukan datanya harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana dikemukakan Moleong (2007:324) yang dalam pemeriksaan data menggunakan empat kriteria : Derajat Kepercayaan (*Credibility*), Keteralihan (*Transferability*), Kebergantungan (*Dependability*), Kepastian (*Confirmability*). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Denzin dalam Moleong (2012:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dalam Moleong, 2012:330). Hal ini dapat di capai menggunakan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan seseorang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian Evaluasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pesawaran berdasarkan teori Hamalik (2003) adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi perencanaan dan pengembangan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pegawai di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran, dimana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran sudah membuat rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD dalam jangka waktu 2016-2021.
2. Pada indikator *monitoring* masih belum cukup baik, hal ini dikarenakan kurangnya sumberdaya manusia dalam melaksanakan tugas untuk bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesawaran. Selain itu, dana yang tidak sesuai dengan yang dianggarkan menjadi salah satu penyebab *monitoring* yang tidak maksimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa mengenai indikator evaluasi *monitoring* daerah kabupaten Pesawaran dalam mengurangi rumah tidak layak huni belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

3. Pada indikator evaluasi dampak sudah cukup baik hal itu dibuktikan dengan bangunan warga yang mendapatkan bantuan menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya yang tidak layak untuk dihuni. Namun, terdapat pula rumah yang telah mendapat bantuan sebelumnya menjadi rumah tidak layak huni kembali hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya perawatan bangunan yang minim akibat keerbatasan dana yang dimiliki oleh pemilik rumah penerima bantuan. Sehingga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran perlu adanya peningkatan optimalisasi peran dan adanya sosialisasi agar penerima bantuan rumah tidak layak huni dapat menjaga keadaan rumahnya.
4. Indikator evaluasi efisiensi belum cukup baik hal ini dikarenakan jumlah unit yang mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni belum merata dan baru terealisasikan sebesar 2.123 unit dari total rumah tidak layak huni sebanyak 8.645 unit. Artinya, persentase bantuan untuk rumah tidak layak huni yang diberikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran adalah sebesar 24,53%. Sehingga, dalam program bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesawaran perlu adanya bantuan tambahan baik dari APBN ataupun APBD.

## **B. Saran**

Saran dari penelitian Evaluasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya tambahan dana APBN dan APBD agar tujuan dari program bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesawaran dapat berjalan sesuai target yang di inginkan.
2. Sosialisasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni kepada penerima bantuan perlu ditingkatkan. Perlu adanya spesifikasi terkait indikator sasaran dan indikator rumah tidak layak huni penerima bantuan di Kabupaten Pesawaran dan perlu adanya peningkatan pengawasan dalam verifikasi penerima bantuan agar distribusi program dapat merata kepada kelompok sasaran.
3. Masyarakat seharusnya dapat menjaga keutuhan rumahnya setelah mendapatkan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pesawaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, Samsul. 2011. Metode Riset Evaluasi. Yogyakarta. Lakbang Grafika.
- Hamalik, Oemar. 2003. Kurikulum dan pembelajaran. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Husni, H.S. 2010. Evaluasi Pengendalian Sistem Informasi Penjualan. Jakarta
- Kuswartojo, Tjuk. (2005). Perumahan dan Permukiman di Indonesia. Bandung, Penerbit ITB.
- Moleong, Lexy J. Moleong. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sahya, Anggara.2012.IlmU Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance).Bandung:CV Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2010. Memahami penelitian kualitatif. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- Wirawan. 2012. Evaluasi:Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Depok. PT Raja Grafindo Persada.
- Wibawa, Samodra Dkk. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada